

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Stabat

¹ Tira Mulia Anjani, ² Abdullah Sani, ³ Nurul Hasanah

^{1, 2, 3} STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

¹ tiramuliaanjani@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Good Corporate Governance is carried out by taking into account aspects of employee performance, namely conducting training to improve employee skills functionally, training employees to work together as a team. Based on the results of the above observations, it can be seen that the implementation of Good Corporate Governance has been carried out properly by the Stabat Branch of Bank Syariah Indonesia. So, to describe the implementation of Good Corporate Governance in improving employee performance, the authors are interested in proposing a research title, namely "Analysis of the implementation of Good Corporate Governance on employee performance at PT. Bank Syariah Indonesia Stabat Branch Period 2021-2022". This background made the researchers formulate the purpose of this study, namely to find out the application of Good Corporate Governance in improving employee performance at PT. Bank Syariah Indonesia Stabat Branch for the 2021-2022 period. The research method used in this study is a qualitative research method using data collection techniques through observation, interviews and documentation with data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and concluding or verifying data. After carrying out all the steps mentioned above, the results of this study can be concluded that there is a positive relationship from the implementation of Good Corporate Governance which will produce a good work culture so that company goals will be easier to achieve. A good work culture will be able to build a dynamic and professional work environment for BSI KCP employees. stab.

Keywords: Analisis, Good Corporate Governance, kinerja karyawan.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam perbankan sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan operasional perbankan. Dimana perbankan merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dana kepada pihak pengelola, maka akan sangat dibutuhkan pengelolaan yang sangat hati-hati dalam pengelolaan risikonya, untuk menumbuhkan image yang positif dimata nasabah, terlebih lagi tugas perbankan pada dasarnya adalah kepercayaan menghimpun dana dan menyimpan dana. (Negara, 2019)

Penerapan *Good Corporate Governance* berkaitan dengan kinerja (Alpi, 2019). Dimana kinerja merupakan derajat penyusunan tugas yang mengatur pekerjaan seseorang. Jadi, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Kinerja pada dasarnya merupakan apa yang

dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi meliputi kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran ditempat kerja dan sikap kooperatif. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Krisnawati & Bagia, 2021).

Good Corporate Governance merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis (Fidiawati & Sulistyowati, 2022). Secara umum corporate governance terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam kinerja perusahaan merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global. Sebelumnya, banyak isu-isu di Indonesia mengenai lemahnya penerapan good corporate governance dalam kinerja perusahaan (Suryanto, 2019).

Praktik *Good Corporate Governance* telah lama diterapkan bank Syariah Indonesia dalam organ maupun proses bisnis Perusahaan (Hendra Prasetyo, 2020). Komitmen penerapan *Good Corporate Governance* terbukti memberikan dampak positif dan sejalan dengan pencapaian kinerja perusahaan yang meningkat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan tidak hanya para nasabah dan pemegang saham namun juga stakeholder lainnya.

Penerapan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan memperhatikan aspek kinerja karyawan yaitu melakukan pelatihan peningkatan keahlian karyawan secara fungsional, melatih karyawan dalam bekerja sama sebagai tim. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Stabat Periode 2021-2022”.

2. TELAAH TEORITIS

Tata kelola perusahaan merupakan suatu cara atau proses maupun sistem yang mengendalikan dan mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pihak yang

berkepentingan dengan perusahaan, dengan tujuan mewujudkan nilai tambah untuk semua pihak yang berkepentingan kepada perusahaan (Hadistya & Hardika, 2021). Dimana tujuan utama yang ingin dicapai dari implementasi Good Corporate Governance ialah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang serta menciptakan value added bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Theresia Shirley Tanadi, 2019). *Good Corporate Governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Saidatun Zakiyah, Fuadi, 2022).

Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan asset dijalankan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku serta dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi (D, 2022). Dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi, Bank Syariah Indonesia Cabang Stabat telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan entitas utama Bank Syariah Indonesia.

Penerapan *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan GCG, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Zahrawani et al., 2021).

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Bank Syariah Indonesia secara terus menerus dan konsisten melaksanakan dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aktivitas bisnis dan operasional sehingga diperoleh tingkat kesehatan bank yang sangat baik. Dalam melakukan hal ini, Bank Syariah Indonesia senantiasa mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku (MA Harahap, 2021).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dengan metode kualitatif dilakukan bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. lokasi penelitian ini di kantor Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat yang beralamat di Jl. Proklamasi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Sumber data didalam penelitian ini terbagai menjadi 2 (dua) bagian yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang pertama peneliti lakukan yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance sebagai suatu mekanisme dalam tata kelola organisasi secara baik yang melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan diantaranya kinerja keuangan, peningkatan laba, asset, dan pembiayaan. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* terdapat prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), professional (*independensi*), dan kewajaran (*fairness*) dalam mencapai tujuan tersebut.

Adapun hasil penelitian pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* pada bank BSI KCP Stabat adalah sebagai berikut :

a. Transparansi

Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Aspek transparansi dilihat dari ketersediaan informasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha maka diperoleh informasi sebagai berikut :

BSI KCP Stabat menyediakan informasi yang cukup akurat, tepat waktu kepada segenap *Stakeholders* dan memberikan Informasi material berupa publikasi secara *continue* laporan keuangan tiap tri wulan dan tahunan, serta informasi berupa

peningkatan pelayanan akses data. Selanjutnya keterbukaan dalam produk-produk yang terdapat di Bank Syariah Islam KCP Stabat seperti produk simpanan maupun produk pembiayaan. Dalam produk simpanan terdapat banyak akad yang akan diterangkan kepada CS dan terdapat pada browser yang berisi tentang pengertian, jenis, dan jumlah bagi hasil. Sedangkan pada produk pembiayaan sama seperti produk simpanan terdapat banyak akad dan akan diterangkan kepada AO dan juga terdapat browser pembiayaan yang berisi tentang pengertian, jumlah, bentuk dan penggunaan pembiayaan, penarikan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan pembayaran bagi hasil, pengakuan hutang, jaminan, asuransi terhadap barang-barang jaminan atau barang-barang yang dibiayai, asuransi terhadap pembiayaan atau jiwa pihak kedua, syarat-syarat yang harus diperhatikan pihak kedua, pemeriksaan dan pengawasan, pernyataan, biaya-biaya lainnya, domisili, dan ketentuan-ketentuan lain. Kesepakatan diwujudkan dengan penandatanganan akad oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Aspek transparansi dilihat dari kemudahan mengakses informasi Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha dalam hal ini transparansi diwujudkan oleh BSI KCP Stabat melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, dengan cara mempersilahkan nasabah untuk mengakses sebagian informasi tertentu tentang bank, seperti neraca dan laporan keuangan yang telah diaudit yang dapat diakses pada situs website www.bsisyariah.co.id. Selain itu masyarakat dan para pemegang saham juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan perusahaan.

Dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem manajemen informasi dari sebuah bank syariah memiliki tantangan terbesar yaitu kompleksitas. Kompleksitas ini terkait dengan ciri perbankan syariah yang masih tergolong sebagai industri muda. Di sisi lain pengembangan teknologi informasi merupakan salah satu keputusan strategis yang membutuhkan dana investasi besar. Hal ini juga diakui oleh BSI KCP Stabat. Dalam hal teknologi informasi Bank Syariah Islam KCP Stabat belum bisa dikatakan unggul dan masih memerlukan banyak perbaikan yang harus ditindak lanjuti.

Aspek transparansi dilihat dari kerahasiaan bank dan penyampaian kebijakan. Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha, BSI KCP Stabat sama seperti bank pada umumnya ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar dan harus dirahasiakan seperti data nasabah dan lainnya. Serta ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang memang tidak boleh diketahui oleh pihak luar karena bersifat rahasia.

Aspek transparansi juga berkaitan dengan visi dan misi bank. Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha, BSI KCP Stabat dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perundang undangan yang berlaku, serta melaksanakana *Good Corporate Governance*, dengan begitu dapat mempermudah mencapai visi dan misi dari Bank Bank Syariah Islam KCP Stabat. Akan tetapi dalam keterbukaan visi dan misi tersebut tidak diterterakan di laman website BSI KCP. Stabat. Karena sudah ada di laman website BSI.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Aspek akuntabilitas dilihat dari perincian tugas dan tanggung jawab. Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha dalam pelaksanaannya BSI menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank. BSI juga mempunyai organ pada struktur organisasi yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Setiap karyawan BSI KCP Stabat diharuskan melaksanakan sesuai dengan DUJ (Daftar Uraian Jabatan) sesuai dengan jabatan-jabatan dan tugasnya. Dalam hal tersebut Bank Syariah Islam KCP Stabat masih terdapat perangkapan DUJ dalam melakukan aktivitas bisnisnya dikarenakan dari SDM yang terbatas sehingga banyak job yang dirangkap oleh beberapa karyawan.

1) Aspek akuntabilitas dilihat dari kompetensi yang sesuai.

Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha, BSI KCP Stabat selalu memperhatikan setiap perkembangan dari kinerja karyawannya. Hal tersebut sudah diterapkan pada saat penerimaan karyawan BSI KCP Stabat tidak hanya melihat dari kejurusan tetapi juga berpatokan kepada pengalaman kerja dari si calon karyawan. Karena hal itu nantinya akan berpengaruh terhadap kompetensi yang dimiliki karyawan dan sangat berpengaruh pada kinerja bank. Setiap karyawan BSI KCP Stabat diharuskan melaksanakan sesuai dengan DUJ (Daftar Uraian Jabatan) dan sesuai dengan jabatan-jabatan dan tugasnya.

2) Aspek akuntabilitas dilihat dari sistem pengendalian internal.

Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha, BSI KCP Stabat menerapkan pengendalian intern untuk semua jenis transaksi. Dalam pengendalian diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam

diri setiap karyawan. Selain penengendalian diri, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini sudah menjadi sebuah budaya dalam BSI KCP Stabat, karena bentuk pengendalian intern tersebut telah melekat pada sistem kerja setiap karyawan.

3) Aspek akurabilitas dilihat dari pengukuran kinerja.

Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha, BSI KCP Stabat selalu diaudit kinerjanya oleh lembaga-lembaga auditor, baik auditor internal, auditor eksternal serta dewan komisaris (komite audit). Hal ini dilakukan oleh BSI Pusat dan DPS. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPS adalah dengan melakukan inspeksi medadak di setiap kantor BSI termasuk Bank Syariah Islam KCP Stabat untuk melakukan analisis penerapan masalah produk, akad dan pelayanan. Adapun yang menjadi objek auditing dari DPS adalah menyangkut masalah kontrak, akad, kebijakan, produk, transaksi, memorandum, dan akta perjanjian, laporan keuangan.

4) Aspek akuntabilitas dilihat dari pelaksanaan tugas sesuai pedoman.

Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha, seluruh kegiatan di BSI KCP Stabat dituntun untuk patuh terhadap semua peraturan, baik undang-undang maupun prinsip-prinsip syariah. Karyawan BSI KCP Stabat dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, karena BSI KCP Stabat memiliki daftar uraian jabatan yang masing-masing tugas sudah dibagikan menurut jabatannya.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Aspek responsibilitas dilihat dari kepatuhan hukum. Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha, BSI KCP Stabat dalam semua kegiatannya telah mematuhi hukum-hukum yang berlaku, baik itu hukum perundang-undangan seperti masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja. Serta hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan seperti bersih dari riba, dan berlaku adil tanpa memandang apapun.

1) Aspek tanggungjawab dilihat dari bentuk pertanggungjawaban sosial.

Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha, BSI KCP Stabat memberikan pinjaman lunak yang disebut dengan qardh dan pinjaman kebajikan yang dikenal dengan qardhul hasan. Apabila nasabah memang tidak mengembalikan pinjamannya dengan alasan yang dibenarkan oleh pihak bank, maka nasabah diperkenankan untuk tidak mengembalikan dari dana ZIS yang ada pada BSI KCP Stabat.

BSI KCP Stabat berkomitmen untuk selalu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan program kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

2) Aspek tanggungjawab dilihat dari prinsip kehati-hatian.

Menurut *Branch Operational Service* BSI KCP Stabat ibu Syafridha, dalam mengelola unit bisnis selalu dihadapkan dengan risk and return (resiko dan pendapatan). BSI KCP Stabat telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian terutama pada resiko-resiko yang terdapat pada bank yaitu:

- a) *Systematic Risk* (resiko yang sistematis) yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum.
- b) *Unsystematic Risk* yaitu resiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Dalam melakukan manajemen resiko di bidang *funding* (pendanaan), BSI KCP Stabat menerapkan manajemen resiko pendanaan. Hal ini ditempuh bank dengan cara mengetahui data pribadi nasabah yang meliputi data pekerjaan, data perusahaan dan data keuangan lain.

Hal tersebut dilakukan BSI KCP Stabat untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan dihadapi. Dalam hal manajemen resiko pembiayaan diwujudkan oleh bank dengan cara melakukan pembinaan dari awal pembiayaan sampai pembiayaan itu

lunas. Itu fungsi analisis 5 C oleh *Analyst Officer* (AO) sebagai upaya untuk meminimalisir resiko, khususnya dalam hal pembiayaan.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan diketahui bahwa aspek pertanggung jawaban (*responsibility*) pada BSI KCP Stabat sudah efektif karena BSI KCP Stabat dalam semua kegiatannya telah mematuhi hukum-hukum yang berlaku, baik itu hukum perundang-undangan dan hukum syariah, serta melaksanakan prinsip kehati-hatian.

d. Profesional (*Independency*)

Profesional yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*Independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BSI KCP. Stabat..

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diperoleh gambaran bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat mempunyai dampak positif terhadap kinerja karyawan, yang dibuktikan dengan adanya sistem reward berupa bonus atau insentif maupun kenaikan jabatan hal tersebut dilakukan guna untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, dengan menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten maka akan semakin meningkat pula kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, akurat, memadai dan mudah diakses oleh karyawan yang dimana hal ini sesuai dengan prinsip transparansi. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat dibuktikan juga dengan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya secara profesional pelatihan yang juga diberikan kepada karyawan, manajer yang selalu terbuka atas setiap informasi kepada karyawan dan sifat independensi yang selalu diterapkan koperasi agar tidak adanya intervensi dari pihak lain yang dapat merugikan koperasi serta dapat menurunkan kinerja karyawan.

Good Corporate Governance tidak hanya berdampak baik bagi peningkatan kinerja karyawan, akan tetapi juga berdampak positif pada kinerja, dilihat dari meksipun terkena dampak Covid-19, Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat tetap menjalankan

kegiatan operasionalnya dan tetap bertanggung jawab membayar gaji seluruh karyawan dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini disebabkan karena Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasionalnya secara efektif. Pencapaian ini tidak terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance* pada BSI Stabat. Selain itu dampak dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu proses pengambilan keputusan pada BSI Stabat dapat berlangsung secara lebih baik, yang kemudian menghasilkan keputusan yang optimal.

Hal ini sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip transparansi yang merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Transparan terhadap anggota dengan berkomunikasi baik dengan anggota dan menerima segala bentuk keluhan, kritikan maupun saran-saran, sehingga koperasi akan mampu memperbaiki sesuai dengan keinginan anggota, dengan demikian koperasi mampu menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Tidak hanya itu dengan penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten maka hal tersebut juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Stabat, tingkat kepercayaan para anggota maupun masyarakat luar kepada pihak bank akan meningkat dan akan berdampak pada meningkatnya keinginan anggota untuk menggunakan produk dan layanan Bank Syariah Indonesia sehingga image positif koperasi akan naik.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia Stabat memang cukup baik, meskipun pada prinsip akuntabilitas masih belum maksimal diterapkan. Pada dasarnya sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang dilakukan dengan mengatur tugas maupun wewenang dari masing-masing organ yang ada di struktur organisasi. Akan tetapi dalam penerapannya masih adanya *job description* yang dirangkap dalam operasional Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat. *Job description* dalam operasional mengakibatkan berkurangnya produktivitas karyawan sehingga berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Secara teoritis, penerapan *Good Corporate Governance* akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja suatu perusahaan termasuk kinerja karyawan, dengan tata kelola perusahaan yang baik maka profitabilitas dan citra perusahaan akan meningkat, sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan untuk memenangkan persaingan secara global.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat Karya Mandiri, jawaban dari pihak Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat tentang penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hasil dari wawancara yang kemudian disebut sebagai data atau temuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Bapak Sandi Faisal selaku Manajer Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat ditanya terkait pengertian *Good Corporate Governance*, sebagai berikut:

“Good Corporate Governance merupakan suatu arahan berupa aturan dan sistem dalam bisnis yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja dan image perusahaan.”

Kemudian peneliti menanyakan terkait dengan Prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan kinerja karyawan, meliputi: *Transparansi* (*transparency*), *akuntabilitas* (*accountability*), *pertanggungjawaban* (*responsibility*), *kemandirian* (*Indenpedency*) dan *kewajaran* (*Fairness*). Adapun hasil wawancara peneliti tentang penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan kinerja karyawan antara lain sebagai berikut:

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Transparency merupakan suatu keterbukaan dalam memberikan informasi yang relevan baik secara materil maupun non materil, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dimana perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses serta dipahami oleh karyawan atau oleh pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sandi Faisal yang berkaitan dengan penerapan prinsip *transparansi* dalam meningkatkan kinerja karyawan, beliau mengatakan bahwa:

Dalam aspek *transparansi* kami Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat dimana seluruh kinerja dalam satu tahun dibuat laporan keuangan dan dalam laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi yang biasanya kami adakan pada awal tahun. Dalam hal penyampaian informasi terkait dengan visi dan misi kami sudah tersampaikan dengan baik dan terbuka kepada para karyawan maupun anggota yang mereka bisa akses di internet. Kami juga selalu mengedepankan keterbukaan kepada para karyawan dalam pengambilan keputusan terhadap setiap permasalahan yang ada.

Hal tersebut merupakan salah satu cara yang kami lakukan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan di Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat.

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa segala sesuatu terkait dengan kinerja maupun kegiatan di Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat tercantum dalam RAT. Tidak hanya itu taransparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi sudah dilakukan dengan baik oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat dapat mempengaruhi kinerja karyawan pada koperasi tersebut, sehingga apabila prinsip transparansi diterapkan dengan baik maka semakin meningkat pula kinerja karyawan, dan sebaliknya jika prinsip transparansi tidak diterapkan dengan baik maka kinerja karyawan koperasi tersebut juga semakin buruk.

2) Akuntabilitas (Accountability)

Untuk prinsip akuntabilitas kami(Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat) penerapannya masih belum maksimal, masih belum sesuai dengan job description masing-masing organ koperasi, masih ada beberapa job yang memang dirangkap, akan tetapi job yang kami rangkap sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, dan untuk mengurangi biaya/beban yang akan dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Stabat jika mengambil karyawan dari luar, sehingga kami selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan.

Penerapan akuntabilitas pada Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat sebenarnya bertujuan untuk mengatur tugas maupun wewenang dari masing-masing organ yang ada dalam sruktur organisasi.

3) Pertanggungjawaban (Responsibility)

Dalam menerapkan aspek pertanggungjawaban kami (Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat) selalu memastikan karyawan mempertanggung jawabkan setiap tugas maupun tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Kami (Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat) juga selalu mengadakan rapat internal satu bulan sekali untuk melakukan evaluasi terkait dengan tugas dari masing-masing karyawan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam kegiatan BSI Kcp. Stabat, diharapkan dengan adanya evaluasi dapat lebih meningkatkan kinerja karyawan.”

Dalam hal ini karyawan dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun evaluasi terhadap karyawan dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja mereka dan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Sedangkan menurut bapak Gazali :

Kami (Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat) sudah patuh terhadap peraturan yang ada. Untuk pihak internal pengurus didalamnya termasuk karyawan dalam hal kenyamanan sudah diberikan fasilitas seperti tempat yang nyaman untuk bekerja, akses internet yang mamdai, maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Hal tersebut dilakukan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lancar dan untuk mendukung pelayanan serta kegiatan oprasional BSI kami dan untuk aspek pertanggungjawaban kepada karyawan, koperasi sudah mendaftarkan karyawan kepada BSI Kcp. Stabat.

Pertanggungjawaban yang dilakukan bank terhadap karyawannya adalah dengan menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kinerja karyawan dalam bekerja, sehingga karyawan dalam menjalankan pekerjaannya merasa nyaman dan aman. Pertanggungjawaban BSI Kcp. Stabat kepada karyawannya yaitu dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti akses internet, dapur, ruang ganti dan lain sebagainya. Pertanggungjawaban yang lainnya dengan memberikan anggaran konsumsi setiap hari kepada para karyawan, hal tersebut dilakukan karena jam kerja BSI dari Jam 8 sampai jam 2 siang, selain itu ada pula anggaran BBM bagi karyawan di devisi Pegawai Lapangan (PL).

4) Kemandirian (*Indepedency*)

Kemandirian/indepedenci merupakan keadaan dimana suatu perusahaan dikelola dengan profesional tanpa ada benturan kepentingan maupun tekanan dari pihak manapun. Berdasarkan wawancara dengan bapak Gazali mengatakan bahwa :

Dalam aspek kemandirian kami (Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat) tidak ada tekanan maupun intervensi dari pihak manapun atau melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain, sehingga dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif, dan sepenuhnya merupakan hak pengurus internal Bank Syariah Indonesia Stabat. Selain itu karyawan juga dihimbau bahwa kepentingan koperasi lebih penting dari kepentingan pribadi.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat dalam hal pengambilan keputusan tidak ada intervensi dari pihak manapun dan tidak

melibatkan pihak eksternal koperasi. Karyawan juga selalu di edukasi bahwa kepentingan koperasi diatas kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga tidak ada organ koperasi yang saling mendominasi dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

Dalam aspek kemandirian pada Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari karyawan yang dapat bekerja sama dengan karyawan lain terutama dalam hal menyelesaikan permasalahan yang ada di BSI, karyawan juga tidak segan memberikan pertolongan jika karyawan lain membutuhkan bantuan. Meskipun begitu masih ada beberapa karyawan yang kurang disiplin seperti datang ke tempat kerja tidak tepat waktu dan pulang sebelum waktu yang telah ditentukan.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran atau keadilan ialah perlakuan dari perusahaan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi seharusnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sandi Faisal mengatakan bahwa:

Untuk aspek kewajaran/keadilan kami memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki, kami juga memberikan penghargaan/reward kepada karyawan berupa isentif, dan kami juga mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan rapat dan setiap karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan/ mengemukakan pendapat, maupun ide mereka, sehingga dengan hal tersebut kinerja karyawan dapat ditingkatkan.

Penerapan aspek prinsip kewajaran atau keadilan di Bank Syariah Indonesia Kcp. Stabat dimana setiap karyawan memiliki hak dan kesempatan yang adil/setara dalam bekerja, hal ini dibuktikan dengan adanya sistem reward dan punishment, sehingga apabila prinsip kewajaran diterapkan dengan baik maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Dari penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa dengan menerapkan sistem Good Corporate Governance dengan baik dan tepat dalam kegiatan maka akan berdampak positif terhadap kinerja, dan proses pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat dapat dilakukan dengan baik.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Bank Syariah Islam KCP Stabat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat periode 2021-2022 Sudah efektif, baki pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran atau keadilan.
- b. Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten akan memberikan dampak yang baik bagi lembaga tersebut dan secara tidak langsung akan berdampak pada kinerja karyawan Bank Syariah Indonesia KCP. Stabat periode 2021-2022. Pengaruh yang positif dari penerapan *Good Corporate Governance* akan menghasilkan budaya kerja yang baik sehingga tujuan perusahaan akan lebih mudah untuk dicapai. Budaya kerja yang baik akan dapat membangun lingkungan kerja yang dinamis dan profesional.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. (2019). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 355–364. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3636>
- D, F. A. H. (2022). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance , Leverage , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Dengan. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(2), 94–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.55886/esensi.v25i2.476>
- Fidiawati, & Sulistyowati, E. (2022). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 1939–1948. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4994>
- Hadistya, I. D., & Hardika, M. (2021). Analisis Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada PT Bank Central Asia Tbk. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2013), 3414–3421. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1411>
- Hendra Prasetyo, W. J. dan H. N. L. E. (2020). PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Jurnal Syntax Transformation*, 5(3), 248–253. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.164>
- Krisnawati, N. K. D., & Bagia, I. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.23887/bjm.v7i1.28736>

- Muhammad Arfan Harahap. (2021). *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB). Insan Cendekia Mandiri*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Negara, I. K. (2019). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel pemoderasi (Studi Pada Indeks Sri-Kehatiyng Listed Di Bei). *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 8(1), 46–61. <https://doi.org/10.29303/jmm.v8i1.414>
- Saidatun Zakiyah, Fuadi, A. (2022). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mozaik Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 120–129. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/105>
- Suryanto, A. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Bina Manajemen*, 8(1), 1–33. <https://wiyatamandala.e-journal.id/JBM/article/view/53>
- Theresia Shirley Tanadi, I. W. (2019). ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2017). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(6), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmbk.v3i6.6088>
- Zahrawani, D. R., Sholikhah, N., Pratama, P., & Surakarta, M. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1799–1818. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>